



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. Pahlawan No. 110 telepon 3524001 – 3524011  
SURABAYA

---

---

NOTULEN

- Sidang/Rapat : Rapat Percepatan Usul Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
- Surat : Surat Dinas tanggal 27 Juli 2020 Nomor: 005/ 10466/ 022.3/ 2020
- Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
- Acara : Percepatan Usul Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Pimpinan Rapat
- Ketua : Indah Wahyuni, S.H.,M.Si.  
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
- Notulis : Bellynda Novianti Yusvana Putri.
- Peserta Rapat : (daftar hadir peserta terlampir)
- Kegiatan Rapat : Rapat Koordinasi Uraian Tugas Jabatan Fungsional PPBJ
- Pembahasan : - Tugas Jabfung PBJ :  
1. Perencanaan pengadaan  
2. Pemilihan penyedia  
3. Pengelolaan kontrak  
4. Pengelolaan PBJP secara swakelola  
- Jumlah jabfung di Jatim :  
1. Biro PBJ 16 orang  
2. Dinas kehutanan 2 orang  
3. Dinas Kesehatan 1 orang  
4. Koperasi UMKM 1 orang  
5. Disperindah 1 orang  
6. Dinas PU CKTR 1 orang  
7. RSUD Dr Soetomo 2 orang  
- Apabila pd th 2021, dalam suatu OPD tdk memiliki jabfung PPBJ, maka OPD tidak bisa menunjuk pejabat pengadaan untuk dapat melakukan proses pengadaan langsung/penunjukan langsung/e-purchasing  
- Tahapan profesionalisasi Jabfung PPBJ di K/L/Pemda  
1. Pengangkatan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa sesuai kebutuhan.  
2. Pembinaan pejabat fungsional pengadaan barang jasa yang sudah diangkat.  
- Analisis kebutuhan :  
Formasi jabfung PPBJ masing-masing satuan organisasi disusun berdasarkan analisi kebutuhan pegawai sesuai dg jabatan yg tersedia.  
- Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan :

Jenis pekerjaan, jumlah satker/OPD, jumlah ULP, jumlah paket yg dilaksanakan, nilai pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, rentang kendali, analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas JFPPBJ

- Penetapan formasi jabfung :
  1. Hitung kebutuhan Jabfung di instansi.
  2. OPD membuat 2 surat ke :
    - Usul pengangkatan (bid mutas)
    - Usul formasi (bid P3DASI)
  3. BKD verifikasi dokumen pendukung
  4. Surat pengantar dari SEKDA (rekom formasi)
  5. Validasi perhitungan kebutuhan jabfung per jenjang
  6. Penetapan formasi Jabfung  
Tetapkan kebutuhan jabfung berjenjang sesuai hasil validasi dengan pertimbangan instansi Pembina pusat.

Diskusi dan  
Tanya Jawab

: **Biro PBJ**

- Kemarin ada salah satu OPD yg besar punya UPT banyak di seluruh Jatim, ketika menyusun ternyata jumlahnya banyak sekali hampir 50 atau 80 formasi, ini apa sudah benar kok banyak banget formasi nya. Respon nya gimana dari BKD kalo permintaan formasi nya ini banyak sekali.

**Jawab :**

Bisa karena tidak ada masalah, karena hitungan nya nanti dari bapak ibu sendiri kemudian lakukan verifikasi sendiri, kemudian nanti ke BKD bisa liat apa yg jadi pemberat. Pemberat berupa uraian tugas yang ada, tidak sesuai dengan LKPP. Formasi yg sudah disusun segera diberikan ke BKD agar segera dihitung. Saran menyusun ABK dipastikan dulu bahwa jumlah paket yg dicantumkan di ABK apa sudah real, Perlu diperhatikan jumlahnya dulu.

**Biro Hukum**

- Apakah jabfung PBJ harus di UPT atau dinas?

**Jawab :**

Penempatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing UPT. Apabila suatu UPT butuh jabatan fungsional dan pengadaan disitu banyak maka penempatan bisa di UPT tersebut, tapi jika ada kendala jumlahnya hanya satu maka ditempatkan di dinas juga boleh. Dilakukan perhitungan sehingga butuh berapa jabfung, yg perlu diperhatikan adalah jenjangnya. Terkait Inpassing ada informasi cukup penting bahwa ada jadwal untuk uji kompetensi (Reguler LKPP) bias di cek di [inpassing.lkpp.go.id/jadwal-inpassing-lkpp](http://inpassing.lkpp.go.id/jadwal-inpassing-lkpp) .

**Saran BKD**

- Terkait kendala yang terjadi

**Jawab :**

Kendala nya di dorong terus buat bikin formasi jabfung

tetapi orang yg diusulkan tidak ada dan tidak ada yang punya sertifikat. Diharapkan OPD tetap mengusulkan jabfung. Tapi jika tetap tidak ada usulan maka pengadaan barang jasa bisa melalui biro PBJ tetapi untuk jangka pendek.

**Biro Umum**

- Terkait PPPK untuk jabfung PBJ kalo diangkat dari PPPK apa boleh? Jika diperbolehkan tahun berapa bisa mulai pengajuan PPPK, persyaratan, prosedur gimana?

**Jawab :**

Boleh diduduki oleh PPPK. Target PPPK ini apakah punya kualifikasi dan kompetensi yg dibutuhkan di PPBJ.

**Biro Organisasi**

- Kesulitan nya apakah yg membedakan pertama, muda dan madya itu nominalnya? Karir setelah ada 1 atau 2 org itu trs naik pangkat itu kemana?

**Jawab :**

Kaitan dengan pengangkatan fungsional memang ada beberapa jabatan yg butuh diklat/tidak butuh. Bisa dilaporkan ke BKD yg terkendala dengan kenaikan pangkat. Ada beberapa yg punya jabatan fungsional tapi tidak *in line* dengan kerja daerah nya. Nanti dilihat dulu yg tidak bisa diangkat ini jabatannya apa agar solusi yg diberikan tepat sasaran. Terkait dengan perhitungan ABK menggunakan acuan LKPP. Perhitungan ABK yang mengeluarkan LKPP. Pertimbangan jenjang muda dan madya pada kenyataannya yang menjadi jabfung itu 3c keatas. Nanti di OPD itu jenjang nya muda dan madya karena nanti tugasnya bisa langsung ke pengadaan juga bisa ke perencanaan. Apabila ada jabfung PBJ yg di OPD yang masih di jenjang pertama dan blm ada di jenjang muda di OPD tapi harusnya sudah jenjang muda bisa ke biro PBJ untuk jangka pendek. Komposisi nya 11 madya, 13 muda, dan 33 pertama yang ada di biro PBJ.

**Biro Umum**

- Utuk ASN yg diusulkan pada gol III/C dan III/D di jabfung ada dimana?

**Jawab :**

Di jenjang muda kelas 9

**Biro Umum**

- Pembeda jenjang pertama, muda, dan madya?

**Jawab :**

Pemisah dari jenjang nilai. Untuk jenjang pertama pengadaan sampai 5 M. Untuk 5-10 M jenjang muda, dan diatas 10 M jenjang madya.

Kesimpulan

- : - Jumlah jabatan fungsional tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan sehingga dibutuhkan jabatan fungsional pada masing-masing OPD, sehingga untuk setiap OPD diharapkan mengusulkan formasi jabatan

fungsional Pengadaan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa di tahun 2021.

Surabaya, 29 Juli 2020

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

TTD

PRAHARA Satria Ramadhan, S.STP.

Penata Muda Tk. I

NIP. 19910412 201206 1 002